SAFEnet

Laporan Triwulan
PEMANTAUAN HAK-HAK DIGITAL DI INDONESIA

2023

TRIWULAN III

aduankonten

ng ingin Anda cari pada kolom isian di bawah, cukup 1 bagian kata saja, misalkan: 'Domai
melakukan pencarian. Anda tidak perlu menyertakan 'http://' pada awal kata pencarian ataupun trailing slas

Laporan Pemantauan Hak-hak Digital di Indonesia
Periode : Juli-September 2023

Penanggung jawab:
Damar Juniarto

Koordinator & Editor:
Anton Muhajir

Tim Pemantauan:
Abul Hasan Banimal
Nabillah Saputri
Nenden Sekar Arum
Nike Andaru
Unggul Sagena

Desainer & Tata Letak:
Daeng Ipul

Penerbit
Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)
Jalan Gita Sura III Nomor 55 Peguyangan Kaja
Denpasar, Bali 80115

: +62 811 9223375
: info@safenet.or.id
: @safenetvoice
: safenet.or.id

Daftar Isi

Pengantar

Sejak tahun 2022, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) membuat laporan pemantauan pelanggaran hak-hak digital setiap tiga bulan (triwulan). Laporan ini merupakan pengembangan dari *Laporan Situasi Hak-hak Digital* yang sudah kami lakukan sejak 2019 lalu. Berdasarkan pemantauan yang semakin intensif kami lakukan selama tiga tahun terakhir, bentuk-bentuk pelanggaran hak-hak digital tersebut semakin berkembang dan banyak.

Setelah melakukan evaluasi dan refleksi, kami menganggap laporan setahun sekali terkait situasi hak-hak digital di Indonesia ternyata tidak cukup memadai untuk menangkap situasi yang ada karena begitu banyaknya insiden maupun pelanggaran. Oleh karena itu, kami berharap laporan tiap triwulan ini akan bisa lebih menjelaskan situasi dan kondisi hak-hak digital di Indonesia secara lebih aktual dan faktual.

Secara sederhana, hak-hak digital adalah hak asasi manusia yang berlaku di ranah digital. SAFEnet membaginya dalam tiga domain, yaitu hak untuk mengakses internet, hak untuk bebas berekspresi, dan hak untuk merasa aman di ranah digital. Pada bagian hak untuk merasa aman tersebut, kami juga memasukkan aspek kekerasan berbasis gender *online* (KBGO). Pelanggaran hak-hak digital kami definisikan sebagai semua upaya secara sengaja untuk mengganggu terpenuhinya hak-hak digital tersebut. Contoh pelanggaran hak-hak digital ini bisa berupa pembatasan terhadap akses internet, pemidanaan terhadap ekspresi dan opini, penyerangan terhadap aset-aset digital, dan pelanggaran terhadap privasi.

Pemantauan ini menggunakan tiga sumber. Pertama, laporan langsung ke platform aduan pelanggaran hak-hak digital yang dikelola SAFEnet. Kedua, laporan ke akun media sosial dan *hotline* SAFEnet. Ketiga, pemantauan media massa dan media sosial. Terkait akses internet, pemantauan juga menggunakan aplikasi pihak ketiga, yaitu Internet Outage Detection and Analysis (IODA).

Hasil pemantauan tersebut kami sajikan tidak hanya berupa angka dan data, tetapi juga analisis terhadap beberapa insiden sebagaimana bisa dibaca dalam laporan ini.

Bagian 1 : Akses Internet

SAFEnet membagi akses internet dalam tiga kategori, yaitu infrastruktur, layanan, dan kebijakan. Kategori infrastruktur menyangkut penyediaan teknologi secara fisik, termasuk jaringan telekomunikasi, apakah bermasalah atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kategori layanan mencakup hal yang dialami pengguna sebagai pelanggan penyedia jasa internet, seperti biaya langganan, inklusivitas, diskriminatif, tidak ramah terhadap golongan rentan disabilitas, miskin, dan tidak ada jaringan. Adapun kebijakan meliputi aturan, regulasi, atau keputusan politik pemerintah baik pusat maupun lokal yang berdampak terhadap akses internet.

Dari pantauan pada triwulan ketiga tahun 2023 melalui berbagai mekanisme, tercatat 20 insiden dan isu terkait infrastruktur internet. Akses internet terganggu karena masalah konektivitas infrastruktur, seperti jaringan telekomunikasi bermasalah atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maupun tidak adanya operator (titik buta). Dari sisi layanan, terdapat tiga isu layanan yang mencuat dalam tiga bulan terakhir. Isu ini terkait akses terganggu karena masalah ketidakmampuan akses layanan oleh masyarakat. Misalnya biaya layanan mahal, diskriminatif, atau tidak ramah terhadap golongan rentan disabilitas dan miskin. Dari pantauan isu kebijakan terdapat satu isu yang menyedot perhatian publik terkait kebijakan pemblokiran.

Tabel 1. Gangguan Internet Triwulan III Tahun 2023

Bulan	Kategori	Jumlah	Isu
Juli	Infrastruktur	10	Gangguan internet di Lampung, Aceh, dan Papua.
	Layanan	1	Merger operator seluler
	Kebijakan	-	-
Agustus	Infrastruktur	4	Gangguan internet di Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Aceh, dan Papua.
	Layanan	-	-
	Kebijakan	-	-
September	Infrastruktur	6	Gangguan internet di Riau, Maluku, dan Papua
	Layanan	2	Gangguan aplikasi mobile dan gangguan layanan Wi-Fi publik
	Kebijakan	1	Pemblokiran akses ke beberapa layanan digital

Sumber: SAFEnet, diolah 2023

Infrastruktur

Kendala infrastruktur masih mewarnai triwulan ketiga di tahun 2023 ini. Pada Juli hingga September, gangguan internet terpantau terjadi di kabupaten-kabupaten di Lampung, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Maluku, dan Wilayah Papua.[1]

Dominasi gangguan terjadi karena perbaikan serat optik oleh penyelenggara jasa

internet baik bergerak (*mobile*) maupun kabel (*fixed*). Selain faktor teknis dan perbaikan, gangguan itu juga karena *force majeure* berupa dampak kebakaran dan gempa. Meskipun demikian, masih ada indikasi bahwa gangguan tersebut berkorelasi dengan situasi politik, hukum, dan keamanan terkait Papua.

Misalnya, walaupun pada saat terjadi gangguan internet bersamaan dengan gempa di Teluk Wondama di Papua Barat[2], hari tersebut juga merupakan kunjungan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurrahman di Jayapura[3,] ibukota Papua yang jauh dari Papua Barat. IODA mencatat, pada dua *dashboard* semua menunjukkan adanya gangguan internet.

Bentrok aparat dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua pada 13 September 2023 juga bersamaan dengan turun drastisnya konektivitas internet di Papua. Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan TNI Laksda Julius Widjojono telah memberi pernyataan tentang Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang mau merayakan "ulang tahun"[4]. *Alert band* IODA juga menunjukkan gangguan koneksi pada 4, 6, dan 8 Juli yang merupakan waktu persiapan pengamanan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Papua.[5] Namun, PT Telkom Witel Papua menyampaikan bahwa gangguan internet sejak 16 September 2023 di Merauke, Papua Selatan merupakan murni *force majeure*.[6]

Sejak 16 September, terjadi gangguan masif jaringan sistem komunikasi kabel laut (SKKL) Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) Ruas Merauke-Timika.[7] Menurut investigasi Telkom, terjadi *shunt fault* atau luka pada kabel laut.[8] Putusnya jaringan internet membuat kegiatan terganggu. Mulai dari kendala pencermatan daftar calon tetap legislatif Provinsi Papua Selatan di Silon KPU[9], terhambatnya proses pendaftaran CPNS, hingga masyarakat kesulitan bertransaksi perbankan.[10] Berlarutnya kondisi ini membuat masyarakat menggelar unjuk rasa ke kantor DPR Kabupaten Merauke.[11] Apalagi, putusnya internet di Merauke sudah terjadi tiga kali selama tahun 2023.[12]

Hasil pantauan IODA dirangkum pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Gangguan Internet di Papua dan Papua Barat Juli-September 2023

Region pada Dashboard IODA	Juli	Agustus	September	Total
Irian Jaya Barat (Meliputi Provinsi Papua Barat, Papua Barat)	4 Juli 6 Juli 8 Juli 29 Juli 31 Juli	5 Agustus 18 Agustus	3 September 9 September 16 Sept-laporan dibuat 23 September	11

Papua (Meliputi Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan)	26 Juli 31 Juli	4-5 Agustus 18 Agustus 22 Agustus	7 September 9-11 September 13 September 23 September	9

Sumber: IODA, diolah 2023

Layanan

Pada awal Juli 2023, terjadi penggabungan (merger) operator selular di mana Indihome bergabung ke Telkomsel dari PT Telkom. Integrasi ini menjadikan kepemilikan efektif PT Telkom di Telkomsel naik menjadi 69,9 persen dan Singtel di Telkomsel menjadi 30,1 persen. Pada triwulan sebelumnya, SAFEnet mencatat adanya merger dan akuisisi dari operator selular di Indonesia. Akibatnya operator selular yang menyediakan jasa internet menjadi empat, yaitu Indosat Ooredoo Hutchinson (IOH), Telkomsel group, XL Axiata, dan Smartfren.

Pemerintah melalui Kominfo juga mendorong merger hingga hanya menjadi tiga operator.[13] Konsolidasi ini bertujuan agar alokasi frekuensinya lebih optimal. Hal ini karena operator memiliki pita *bandwith* lebih besar dan akan membuat layanan lebih baik. Namun demikian, perlu juga dicermati apakah dalam hal aksesibilitas pengguna layanan misalnya, akan berdampak kepada harga paket internet. Apalagi, dengan adanya pesaing global yang dapat masuk ke Indonesia, misalnya Starlink.

Jasa internet juga dapat disediakan oleh perusahaan asing seperti Starlink yang memiliki teknologi satelit mumpuni. Saat ini, Starlink sudah bekerja sama dengan pemerintah untuk penyediaan akses Internet di puskesmas dan juga dipasang di Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Kementerian Kominfo memang telah memberikan Hak Labuh Khusus Khusus Non-Gestationary Satellite Orbit (NGSO) kepada Telkomsat untuk menjadikan Starlink sebagai backhaul. Artinya, keberadaan Starlink masih dalam lingkup *business to business* (B2B), tidak langsung ke masyarakat. Namun, kehadiran perusahaan asing seperti ini dianggap dapat mengancam bisnis para operator seluler dan jasa internet di Indonesia.[14]

Kebijakan

Pada periode triwulan III tahun 2023 ini juga terdapat pemblokiran situs layanan digital seperti Google Docs, Sheets dan Slide pada 21 September 2023. Hasil tangkapan layar situs aplikasi mengonfirmasi akses terhadap konten yang dihalangi. Misalnya pemberitahuan bahwa "Your connection is not private". Ketika tetap lanjut muncul laman *blocking page* Internet Positif milik pemerintah.

Pencarian pada situs *TrustPositif,* pangkalan data daftar hitam layanan elektronik yang diblokir pemerintah, juga menunjukkan Google Docs masuk salah satu situs di daftar blokir. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Usman Kansong mengklarifikasi bahwa mereka telah memulihkan akses

ke sejumlah layanan milik Google, termasuk Docs, Sheets, dan Slide.[15] Usman mengatakan tidak dapat diaksesnya layanan Google tersebut bukan karena diblokir, tetapi "kesalahan teknis".[16]

Gambar 1. Google Docs termasuk salah satu platform yang masuk Daftar Blokir Trustpositif Mesin AIS Kemkominfo pada 22 September 2023 pukul 01.05 WIB. Sumber: Twitter @irfan3

Jika Google Docs dikatakan sebagai kesalahan teknis oleh Dirjen IKP, lain lagi tanggapan Dirjen Aptika, Semuel Pangerapan saat netizen kembali mendapati pemblokiran di aplikasi lain yang mereka akses. Selang beberapa hari kemudian, kesalahan "teknis" kembali terjadi yaitu diblokir (terblokir?) aplikasi seperti Firebase Dynamic Link, Vercel App, HackerRank,[17] dan lainnya.[18]

Kominfo juga melakukan penurunan dan pemutusan akses pornografi, judi daring, dan radikalisme. Namun, dapat saja terjadi "salah sasaran" sehingga platform lain pun terblokir. Misalnya, Semmy mengatakan adanya penyedia layanan *hosting* Vercel yang dipakai untuk judi. Hal ini mungkin karena terdeteksi mesin AIS KOMINFO yang meng-*crawl* konten setiap dua jam dan memasukkannya ke daftar blokir.[19]

Hingga Juli 2023, sebanyak 161.823 konten perjudian daring telah diblokir.[20] Menurut Dirjen Aptika, upaya penanganan dilakukan dengan identifikasi, analisis dan verifikasi terhadap jutaan situs atau website, protokol internet (IP), serta aplikasi bermuatan konten negatif sebanyak-banyaknya.[21] Diakui, dalam proses identifikasi, analisis dan verifikasi, terdapat peluang situs/website yang tidak memuat "konten negatif" bisa terimbas.

Dalam konteks mendekati Pemilu, praktik kebijakan penurunan dan blokir konten dengan mengandalkan mesin kais seperti AIS Kominfo ini perlu ditingkatkan akurasinya pada situs *auto takedown* seperti judi. Bukan pada jenis lain yang memerlukan campur tangan analisis manusia. Misalnya terkait pandangan dan ekspresi politik.

Bagian 2: Kebebasan Berekspresi

Berdasarkan data dari formulir aduan SAFEnet dan pemantauan media, tercatat setidaknya ada 32 kasus kriminalisasi ekspresi yang berhasil didokumentasikan selama periode Juli-September 2023 dengan jumlah terlapor atau korban kriminalisasi sebanyak 30 orang. Jumlah terlapor pada periode ini meningkat sebanyak 18,5 persen dibandingkan kuartal sebelumnya. Sementara itu jumlah pihak yang dilaporkan menurun dari 33 orang di kuartal II tahun 2023 menjadi 30 orang.

Di luar data di atas, pemberitaan menyebutkan ada 25 pelaporan polisi terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong oleh pengamat politik Rocky Gerung per 10 Agustus 2023. Sebanyak 25 laporan tersebut ada yang melapor di Bareskrim sebanyak dua laporan, Polda Metro Jaya empat laporan, Sumatera Utara tiga laporan, Kalimantan Timur sebelas laporan, Kalimantan Tengah tiga laporan, dan Polda D.I. Yogyakarta sebanyak dua laporan.

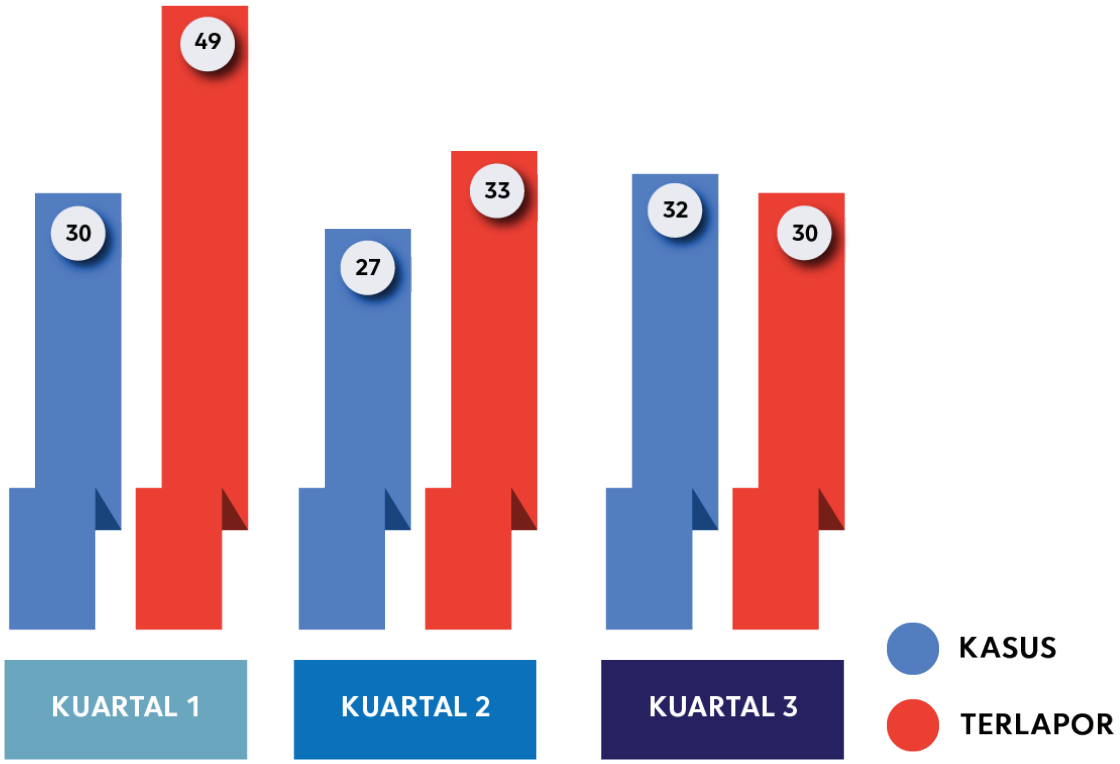

Gambar 2. Perbandingan jumlah kasus antara triwulan I, II dan III 2023. Sumber: SAFEnet, 2023

Sementara itu, pada triwulan III tahun ini, dugaan pelanggaran pasal utama yang paling banyak digunakan adalah pasal terkait pencemaran nama dengan menggunakan Pasal 27 ayat 3 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebanyak 15 kasus serta dugaan menyebarkan konten ujaran kebencian dengan pasal 28 ayat 2 sebanyak 5 kasus. Lainnya tercatat dilaporkan dengan pelanggaran UU ITE tanpa merinci pasalnya sebanyak 10 kasus, serta pasal 27 ayat 1 terkait konten asusila sebanyak 2 kasus.

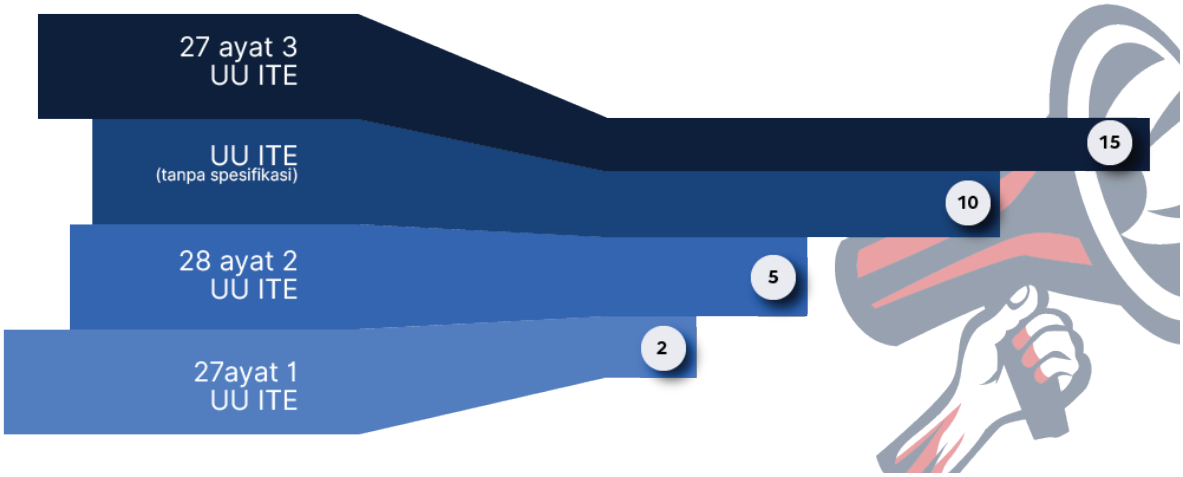

Gambar 3. Pasal yang digunakan untuk mengadukan warganet pada triwulan III tahun 2023. Sumber SAFEnet, 2023

Pada periode ini, latar belakang korban yang dilaporkan ke polisi mayoritas merupakan warganet sebanyak 8 orang, kemudian pembuat konten sebanyak 6 orang, serta organisasi/pemimpin organisasi sebanyak 3 pelaporan. Politisi, akademisi, dan advokat masing-masing sebanyak dua pelaporan, dan sisanya masing-masing satu pelaporan untuk pesohor, pemuka agama, eks/pejabat publik, eks anggota DPR/D, dan akun media sosial.

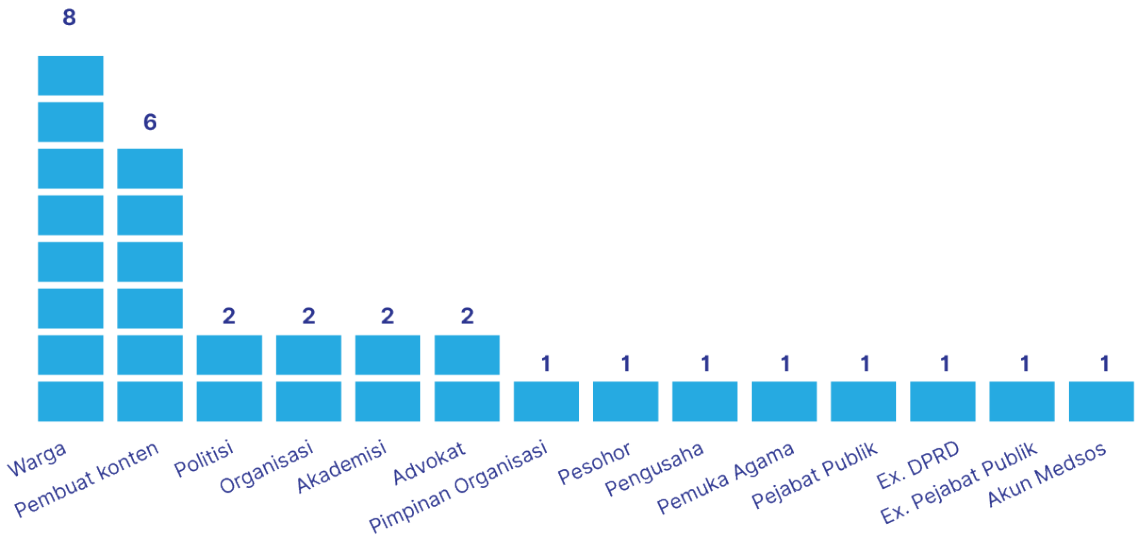

Gambar 4. Latar belakang terlapor pada triwulan III tahun 2023. Sumber: SAFEnet, 2023

Adapun pelapor paling banyak adalah wakil organisasi/institusi/kelompok masyarakat sebanyak 16 kasus, pejabat publik sebanyak 4 kasus, pengusaha/perusahaan dan anggota/eks anggota DPR/D masing-masing 2 kasus, dan sisanya berlatar belakang eks pejabat publik, pesohor, pembuat konten.

Di sisi lain, media yang paling banyak digunakan sebagai alat pelaporan merupakan akun dan konten media sosial yang berasal dari TikTok sebanyak 7 pelaporan, Facebook 5 pelaporan, YouTube 4 pelaporan, Instagram 2 pelaporan, Twitter 1 pelaporan, serta 4 tanpa merinci nama media sosialnya. Selain itu, tercatat sebanyak 3 pemberitaan di media juga dijadikan sebagai bahan pelaporan, serta ada laporan polisi yang dijadikan bahan pelaporan balik.

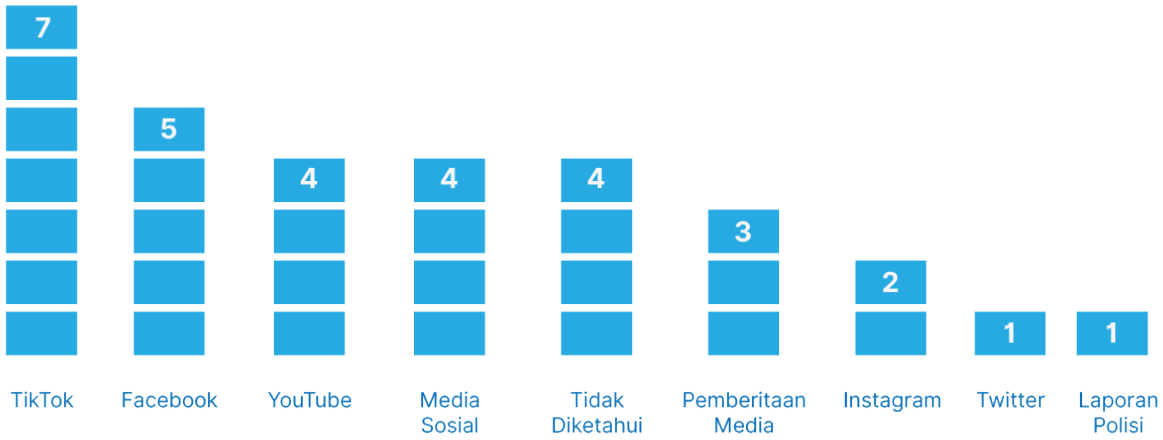

Gambar 5. Media yang dilaporkan pada triwulan III tahun 2023. Sumber: SAFEnet, 2023

Kriminalisasi Ujaran Kebencian

Pada periode kali ini, pasal ujaran kebencian (UU ITE Pasal 28 ayat 2) digunakan untuk mengkriminalisasi warga yang melakukan kritik terhadap pemerintah dan memperjuangkan haknya. Misalnya kasus yang dialami oleh BT, warga yang menolak relokasi Rempang, Batam dipanggil oleh Polsek Galang pada 27 September 2023. BT dipanggil usai mengirim pesan di grup Whatsapp terkait penolakan relokasi. BT disebut menyerukan agar warga menolak sembako yang dibagikan aparat berseragam karena akan berujung permintaan persetujuan warga untuk relokasi.

Sebelumnya diberitakan bahwa warga Rempang menolak direlokasi dari pemukimannya yang akan dibangun Proyek strategis nasional Rempang Eco City, lokasi pabrik produsen kaca China, Xinyi Glass Holdings Ltd. Penolakan ini berujung dengan bentrok antara aparat dengan warga pada 7 September 2023.

Selain itu, kasus yang dialami oleh akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung dan Refly Harun yang juga menggunakan pasal ujaran kebencian UU ITE karena melontarkan pernyataan yang diduga menghina Presiden Joko Widodo pada saat orasi dalam seminar buruh di Bekasi dan disiarkan di akun YouTube. Saat itu, Rocky tengah tengah mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak mendukung buruh serta rakyat kecil.

Pencemaran Nama

Sementara itu, pasal pencemaran nama (UU ITE Pasal 27 ayat 3) paling banyak digunakan oleh pelapor dengan latar belakang simpatisan partai atau politisi, serta pengusaha/ perusahaan. Warga yang melakukan kritik terhadap pejabat publik yang juga merupakan ketua DPC Partai. Salah satu pelaporan dialami akun Facebook yang diduga mencemarkan nama baik Partai Demokrat dan Abdul Faris Umlati serta Orideko Iriano Burdam atas nama Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat.[22]

Salah satu postingan Facebook yang dianggap bermasalah dan dijadikan barang bukti di Polres Raja Ampat antara lain:

> ***"Jangan takut bupati..apalagi wakil bupati oridek KA itu.,.dong dua sama saja kepala tipu ehhh, oridek dari keuangan sampai jadi wakil itu PC Alfaris umlat sE..sudah atur akan..stop pecaya dong dua. Apalagi percaya dong yg Maju pke Demokrat. Itu pnipu., dong pnya partai Demokrat itu..stoppppp".***

Selain itu, salah satu perusahaan pengembang properti juga melaporkan akun TikTok @ompolosbanget karena dianggap membuat konten video negatif yang mengandung provokasi, permusuhan, adu domba, fitnah, penghinaan atau pencemaran nama baik, dan berita bohong terkait proyek Tokyo Riverside Apartemen.[23]

Pendampingan Kasus

Salah satu kasus kriminalisasi yang didampingi langsung oleh SAFEnet pada periode ini adalah kasus yang dialami Daniel Frits Maurits Tangkilisan. Daniel adalah Warga Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah yang menolak tambak udang karena berdampak pada kerusakan lingkungan hidup sebab limbah tambak udang di pesisir Karimun Jawa. Daniel menjadi tersangka sejak 1 Juni 2023, karena dugaan melanggar pasal ujaran kebencian yang dilaporkan oleh pihak yang mengaku mewakili Kelompok Masyarakat Jepara.

Ia dilaporkan oleh warga Karimunjawa atas komentarnya di media sosial Facebook pada 12 November 2022. Komentarnya itu menyoal keberadaan tambak udang di Karimunjawa. Dalam postingan itu, Daniel menulis," Pantai Cemara, 10 November 2022 jam 14.24. 10 hari setelah pantai ini dibersihkan oleh DLH Jepara (konon katanya dengan dana 1M dari petambak yang diwajibkan membesihkan selama 20 hari) dan dikunjungi instansi-instansi setelah acara sosialisasi pembinaan petambak. Bagaimana menurutmu?".

Setelah berbalas komentar dengan akun lainnya, Daniel kemudian mengeluarkan komentar berbunyi "Masyarakat otak udang menikmati makan udang gratis sambil dimakan petambak. Intine sih masyarakat otak udang itu kaya ternak udang itu sendiri. Dipakani enak, banyak & teratur untuk dipangan". Komentar inilah yang dianggap menyinggung warga Karimunjawa dan berbuntut pada dirinya dilaporkan ke Polres Jepara.

Hingga ditulisnya laporan ini, kasus ini masih bergulir di Polres Jepara. Daniel telah dipanggil untuk memberikan keterangan dan klarifikasi, serta telah menyerahkan barang bukti.

Bagian 3: Serangan Digital

Berdasarkan pemantauan SAFEnet selama tiga bulan terakhir, insiden keamanan digital meningkat sebanyak 31 persen dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan III tahun 2023 ini, jumlah insiden keamanan digital yang terekam sebanyak 72 dari triwulan sebelumnya sebanyak 55. Jumlah insiden tersebut terbagi dalam tiga bulan, yaitu Juli sebanyak 23 insiden, Agustus 30 insiden, dan September 19 insiden.

Dibandingkan triwulan yang sama pada tahun lalu, jumlah insiden keamanan digital tersebut cenderung menurun. Pada tahun lalu, insiden keamanan digital selama triwulan III terjadi sebanyak 142 kali yaitu pada Juli sebanyak 20 kali, Agustus 55 kali, dan September 67 kali. Tingginya perbedaan serangan digital pada dua perideo ini karena, salah satunya, pada September tahun lalu terjadi serangan digital massal terhadap jurnalis dan mantan jurnalis Narasi TV dengan jumlah insiden mencapai 37 orang.

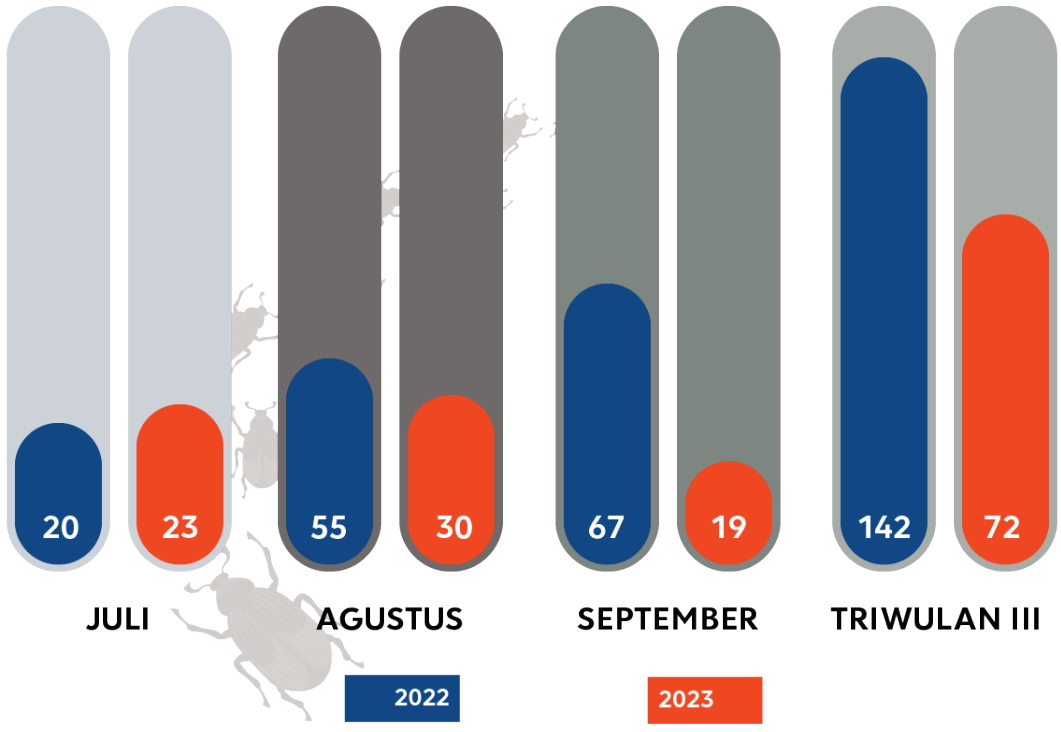

Gambar 6. Data perbandingan jumlah insiden keamanan digital periode triwulan III 2022 dan 2023. Sumber: SAFEnet, 2023

Dari latar belakang gender, perempuan lebih banyak menjadi korban serangan digital, yaitu 25 orang, dibandingkan laki-laki sebanyak 11 orang. Namun, lebih banyak lagi korban yang tidak menyebutkan identitas gendernya, sebanyak 36. Hal ini karena korban memang tidak hanya individu, tetapi bisa juga lembaga, organisasi, atau badan publik.

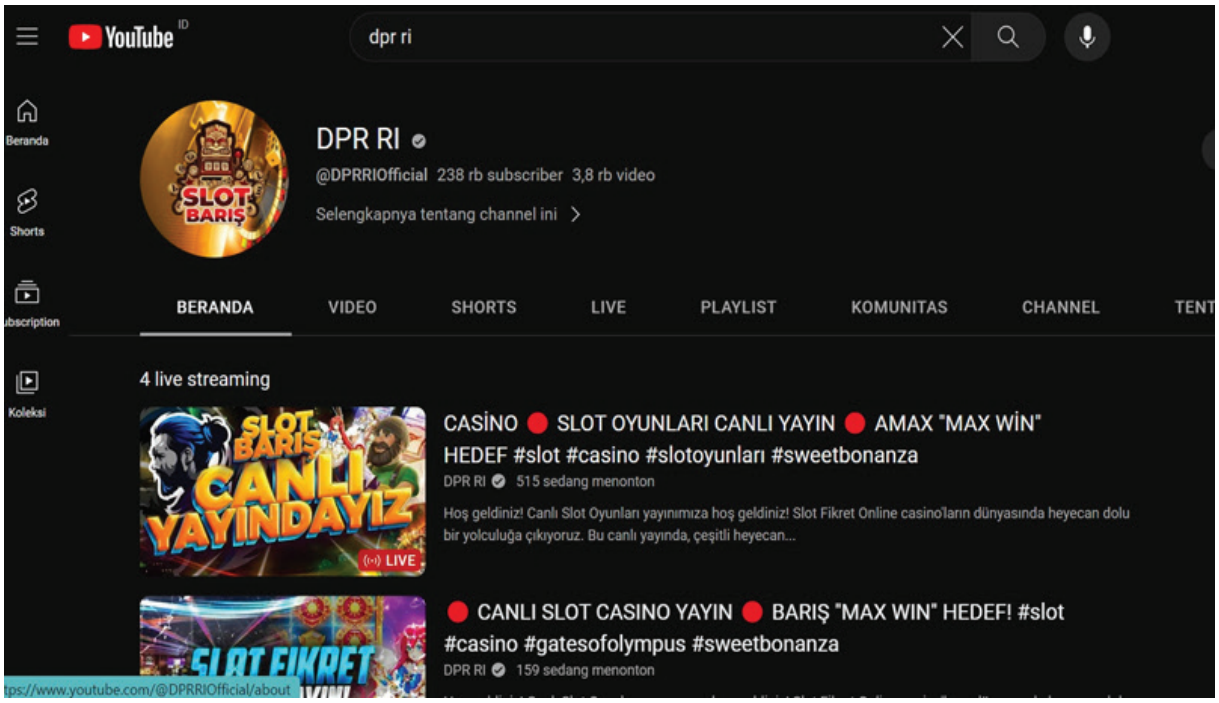

Gambar 7. Tangkapan layar akun YouTube DPR RI mengalami peretasan dan mengunggah materi tentang judi daring pada September 2023

Sebagai contoh, serangan digital terhadap lembaga publik terjadi sebanyak 19 kali. Jumlah tersebut yang membuat lembaga publik menjadi korban terbanyak jika dilihat dari latar belakang korban (25 persen). Bentuk serangan digital terhadap badan publik ini, seperti periode-periode sebelumnya, adalah kebocoran data. Di antaranya kebocoran data Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi berupa 34 juta paspor Indonesia pada Juli 2023. Sebanyak 34 juta paspor Indonesia tersebut dijual di forum jual beli data Bjorka.

Lembaga publik lain yang mengalami serangan digital pada triwulan III tahun 2023 adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Akun YouTube lembaga legislatif tertinggi negara ini mengalami peretasan dan mengunggah konten berisi judi daring pada September 2023. Lembaga publik lain yang menjadi korban serangan digital adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Lembaga yang bertugas melindungi warga negara ini justru mengalami pembobolan data tiga kali pada Juli dan Agustus 2023. Data yang bocor adalah identitas pribadi petinggi Polri serta daftar pemilik motor dan mobil se-Indonesia.

Salah satu pejabat tinggi Polri yang mengalami serangan digital ini termasuk Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi. [24] Pada Juli 2023, Kapolda Jawa Tengah mengalami serangan dalam bentuk phishing melalui pengiriman APK ke WhatsApp. Kapolda Jawa Tengah membuka begitu saja kiriman fail dalam format APK itu sehingga pelaku bisa menguasai ponselnya. Tak perlu waktu lama, dua pelaku pun ditangkap.

Setelah lembaga publik, korban serangan digital paling banyak terjadi pada mahasiswa dan pelajar. Selama triwulan III tahun 2023, serangan terhadap kelompok ini terjadi 14 kali (18 persen). Sebagian mahasiswa yang menjadi korban tidak menyatakan diri sebagai bagian dari gerakan atau organisasi mahasiswa,

baik intra maupun ekstra kampus, tetapi sebagai individu. Begitu pula insiden yang mereka alami.

Meskipun demikian, lebih banyak korban di kalangan mahasiswa adalah bagian dari komunitas atau organisasi mahasiswa. Contohnya mahasiswa yang tergabung dalam @girlup.its, kolektif mahasiswa ITS Surabaya yang mengampanyekan ruang aman dan kesetaraan gender bagi mahasiswa perempuan. Akun ini membuat siaran langsung (*live*) di Instagram untuk merespons kekerasan seksual yang diduga dilakukan salah satu mahasiswa di kampusnya. Ketika hendak mengundang narasumber di Instagram, akun Girl Up ITS tiba-tiba tidak bisa diakses dan kemudian ditangguhkan oleh Instagram. Tidak ada alasan jelas penyebab penangguhan ini.

Setelah lembaga publik dan mahasiswa, korban insiden atau serangan digital paling banyak terjadi pada organisasi masyarakat sipil (OMS) yaitu 13 kali (17 persen). Dua OMS yang mengalami serangan digital ini termasuk Yayasan IDEP di Gianyar, Bali dan Amnesty Internasional Indonesia (AII). Pada Juli 2023, halaman (*page*) Yayasan IDEP di Facebook mendadak diberhenti-terbitkan dan dalam masa peninjauan. Saat itu mereka sedang rutin mengunggah informasi dampak krisis iklim dan abrasi di Pesisir Pebuahan, Jembrana, Bali bagian barat. Tiba-tiba akun mereka tidak bisa diakses.

Serangan digital terhadap aktivis, staf OMS, jurnalis, dan media juga terus terjadi pada triwulan III tahun 2023. Setidaknya terjadi 14 kali insiden dan serangan digital pada kelompok ini selama tiga bulan terakhir. Serangan pada media ini antara lain penangguhan akun Twitter media daring @suaradotcom, serangan DDoS pada situs web Project Multatuli, dugaan peretasan akun YouTube media lingkungan Mongabay Indonesia, dan penggantian tampilan situs web media jurnalisme wargadi Bali, BaleBengong.

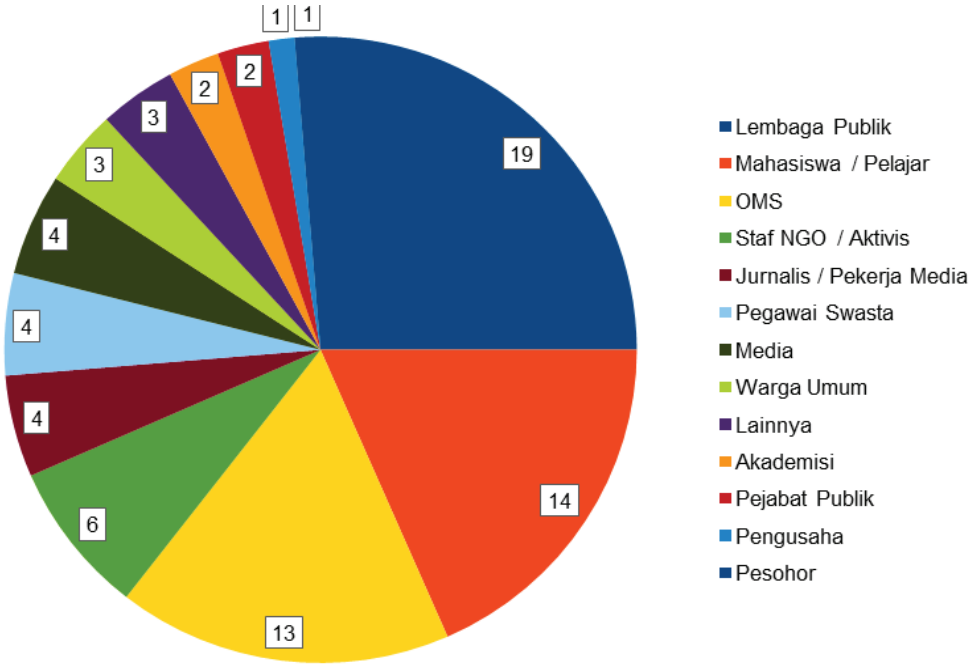

Gambar 8. Latar belakang korban serangan digital selama triwulan III tahun 2023. Sumber: SAFEnet, 2023

Seperti periode-periode sebelumnya, peretasan adalah bentuk serangan digital yang paling banyak terjadi selama triwulan III tahun 2023 ini yaitu 22 kali, lebih dari 29 persen. Fakta ini terus terjadi karena peretasan memang terminologi lebih umum dari berbagai bentuk serangan digital. Namun, hal baru yang perlu menjadi perhatian adalah semakin banyaknya insiden keamanan digital dalam bentuk penangguhan akun atau akun tidak bisa diakses. Penangguhan akun ini menjadi bentuk insiden atau serangan digital paling banyak terjadi kedua, yaitu 17 kali (sekitar 23 persen). Jika ditambahkan dengan insiden akun tidak bisa diakses, maka jumlahnya mencapai 23 kali atau paling tinggi, 31 persen.

Platform yang paling banyak mengalami serangan digital ini adalah Instagram yaitu 30 kali (38 persen), kemudian situs web sebanyak 23 kali (29 persen), dan Whatsapp 11 kali (14 persen). Salah satu platform yang juga mulai muncul sebagai media yang mengalami atau menjadi tempat melakukan serangan digital adalah Tiktok. Platform berbagi video dari China ini menjadi media untuk melakukan serangan doxing setidaknya 2 kali (2,5 persen), jumlah yang sama terjadi pada platform YouTube.

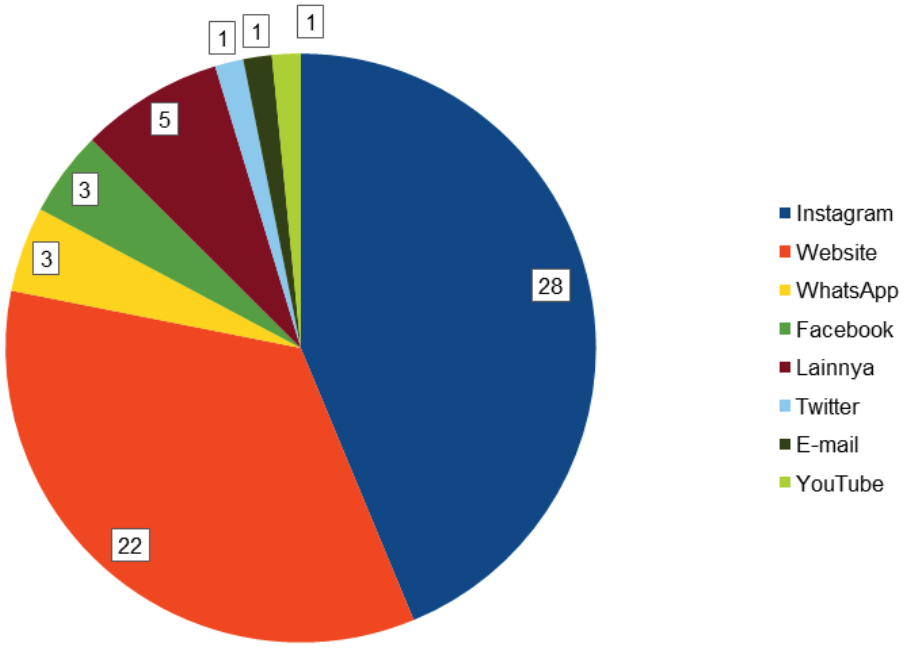

Gambar 9. Platform yang mengalami atau menjadi media melakukan serangan digital pada periode triwulan III tahun 2023. Sumber: SAFEnet, 2023

Banyaknya insiden penangguhan akun Instagram dan mulai munculnya serangan melalui akun Tiktok ini menjadi dua hal yang perlu diantisipasi. Apalagi jika aduan serangan terhadap platform media sosial sebagaimana yang selama ini SAFEnet lakukan tidak segera mendapatkan tanggapan. Jika terus dibiarkan, praktik ini bisa menjadi cara baru untuk membungkam suara-suara kritis di media sosial.

Bagian 4: Kekerasan Berbasis Gender *Online*

Sepanjang triwulan III tahun 2023, SAFEnet menerima 275 aduan KBGO dari berbagai macam pelapor. Aduan ini, 46,18 persen lebih besar dibandingkan tahun lalu di tiga bulan yang sama. Peningkatan terjadi pada Juli 2023 dengan 120 aduan, 40 persen lebih besar dibanding dengan Juli tahun lalu. Peningkatan ini juga berlaku pada Agustus dan September 2023 dibandingkan dengan aduan pada tahun 2022 di bulan yang sama.

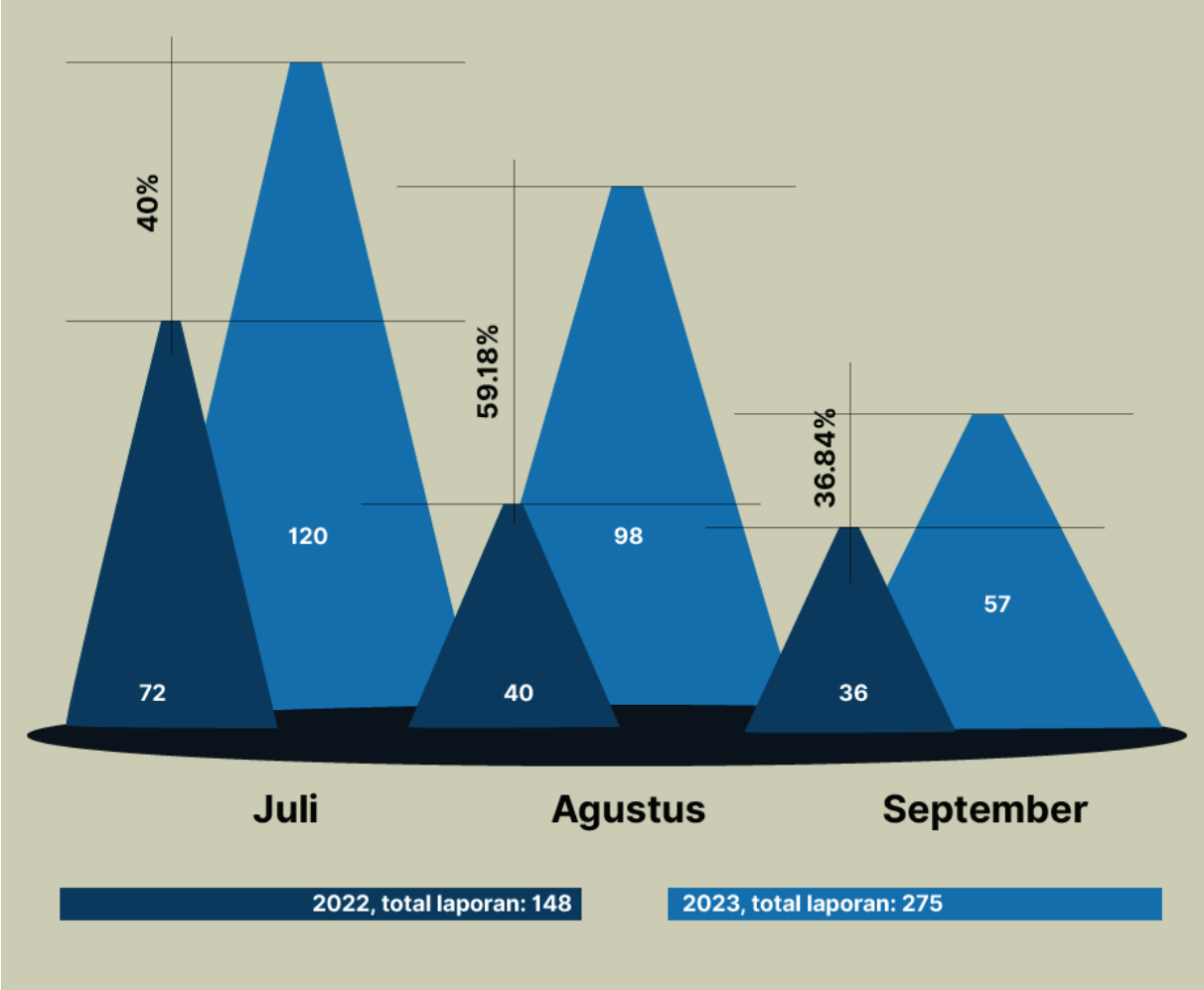

Gambar 10. Perbandingan laporan KBGO per triwulan III tahun 2022 – 2023. Sumber: SAFEnet, 2023

Pelapor yang berasal dari korban langsung tercatat sekitar 250 aduan. Hal ini mengalami peningkatan signifikan dari kuartal lalu dengan 221 aduan. Pelapor korban bergender perempuan lebih banyak mengadukan pengalaman KBGO yang mereka alami dengan 169 aduan. Namun, pelapor korban bergender laki-laki juga membutuhkan perhatian atas pengalaman KBGO hingga 79 aduan. Pengalaman pelaporan ini mengindikasikan bahwa masyarakat sudah berani mengungkapkan pengalaman KBGO-nya. Kebutuhan dalam pemulihan pengalaman atas kejadian KBGO perlu lebih banyak dibuka ruangnya, termasuk dalam upaya pembentukan internet yang aman dan bebas dari serangan apapun.

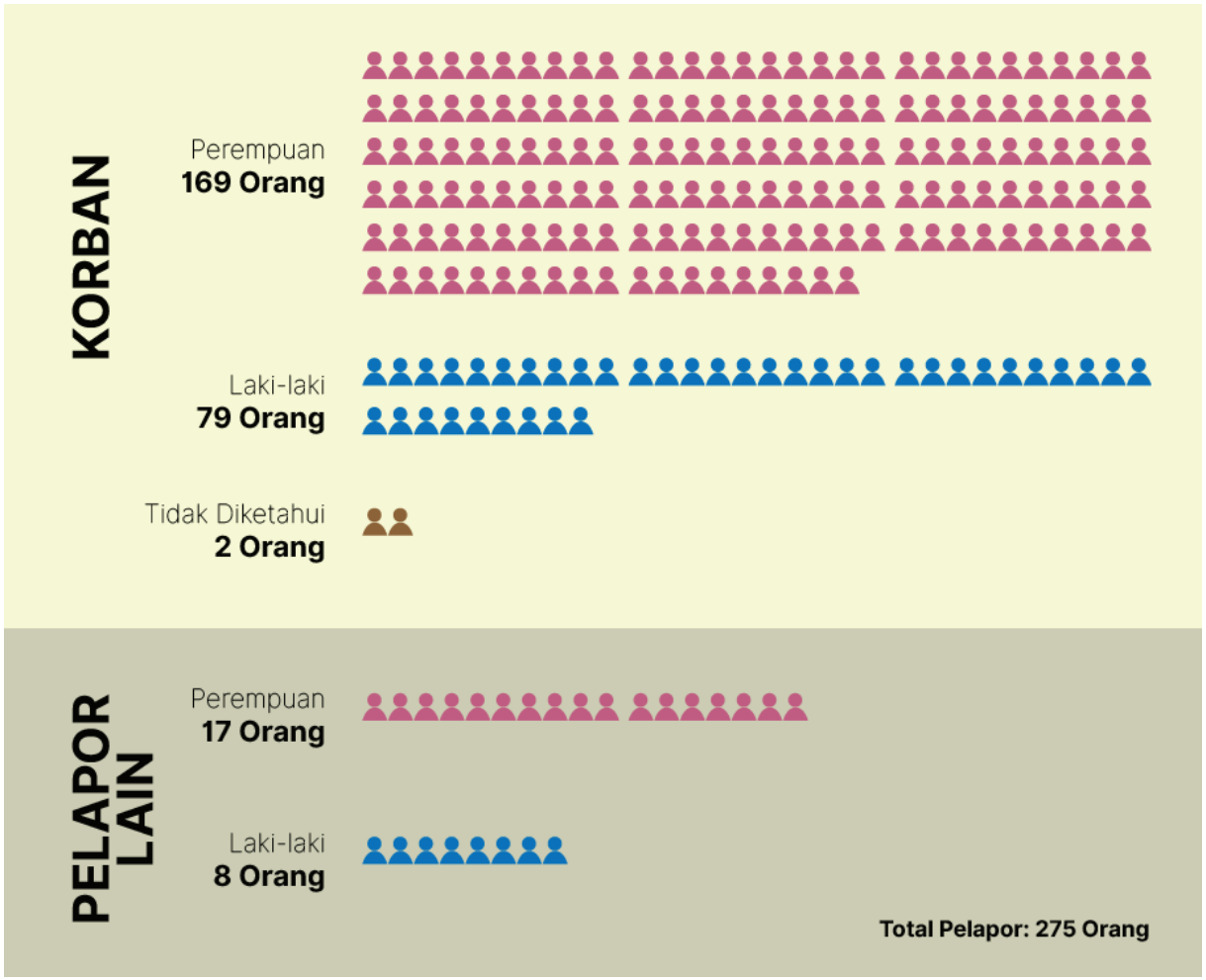

Gambar 11. Pelapor KBGO berdasarkan gender pada triwulan III tahun 2023. Sumber: SAFEnet, 2023

Ancaman *Online Grooming*

Dalam kuartal ini, aduan KBGO penuh perhatian kepada peningkatan *online grooming* yang terjadi di ranah hubungan romantis. *Online grooming* merupakan upaya pendekatan dengan menggunakan teknologi internet untuk memanipulasi hingga mengancam seseorang untuk terlibat dalam tindakan seksual.[25] *Online grooming* seringkali ditemui pada anak-anak yang berselancar dalam media daring. Namun, *online grooming* juga terjadi ketika pelaku menipu daya korban di usia dewasa dengan memanipulasi hubungan hingga penawaran pemberian materi lewat rekrutmen daring.

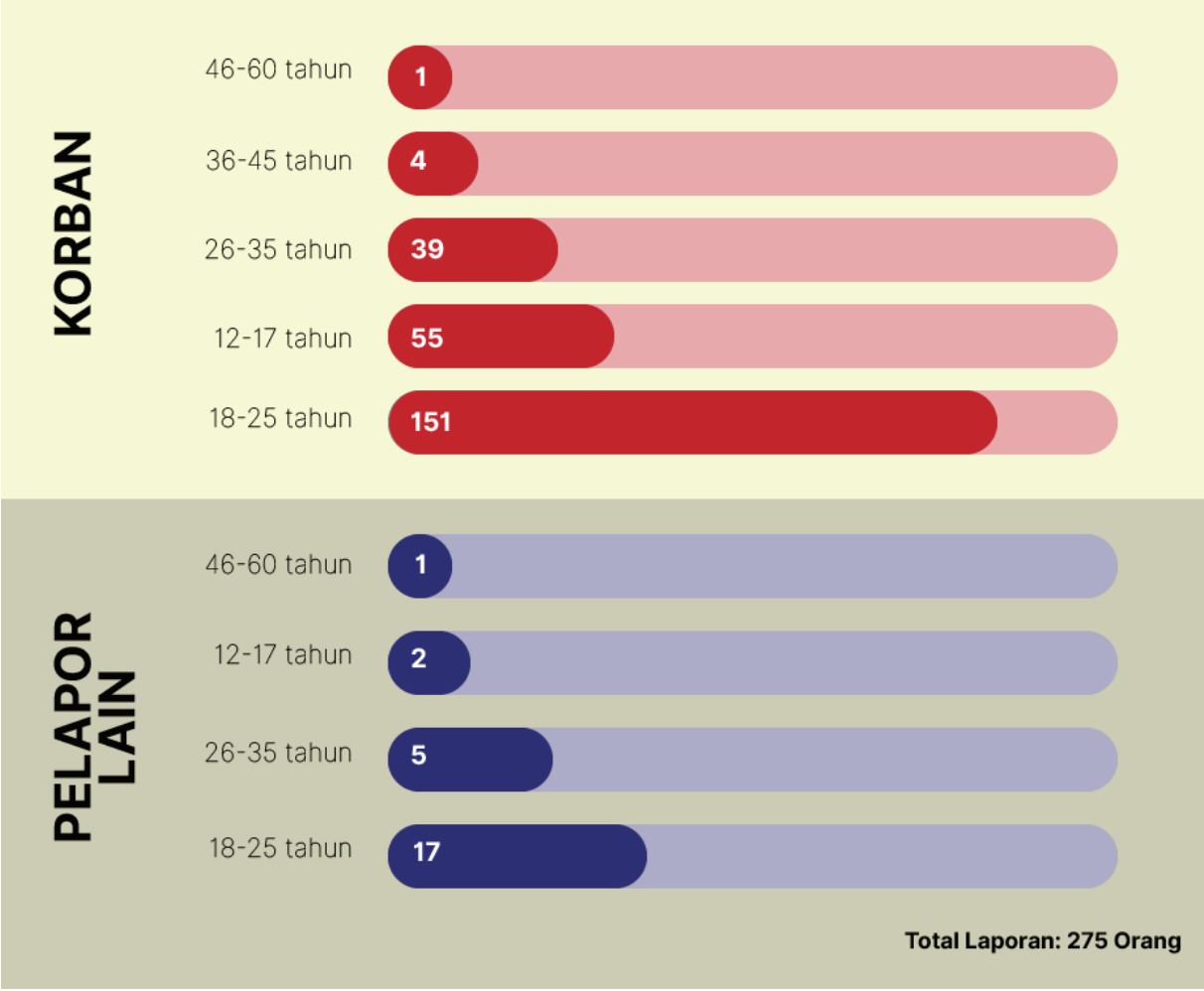

Gambar 12. Pelapor KBGO berdasarkan usia pada triwulan III tahun 2023. Sumber: SAFEnet, 2023

Jumlah aduan KBGO dalam kategori anak (12 – 17 tahun) meningkat dibandingkan kuartal terbaru. KBGO yang terjadi pada anak ditemukan pada beberapa aplikasi, yaitu gim daring, media sosial hingga aplikasi percakapan. Berdasarkan aduan, pelaku melakukan *grooming* dengan mengajak korban melakukan aktivitas seksual melalui panggilan video dan merekam diam-diam. Korban menemui pelaku di aplikasi gim daring lalu berganti platform ke aplikasi percakapan. Pelaku mendekati korban dan berakhir dengan ancaman, konten milik pelaku akan disebarkan.

KBGO yang Berlapis

Kuartal ini, korban banyak mengalami kekerasan *image-based sexual abuse* (IBA) atau penyalahgunaan konten intim hingga 48,36 persen dari total aduan. Penyebaran konten intim non-konsensual, ancaman pemerasan seksual (ancaman *sextortion*) dan pemerasan seksual (*sextortion*) *juga* menghantui korban KBGO. Masing-masing sebanyak 14,18 persen, 10,9 persen, dan 0,08 persen dari total aduan.

Satu jenis KBGO yang menjadi perhatian untuk kita dalam menjaga privasi terhadap keamanan digital kita adalah satu korban yang mengalami kekerasan mengakses akun tanpa izin *(accessing account without consent)*. Pelaku masih

di sekitar korban, yang memiliki akses media sosial korban. Atas kendali tersebut, pelaku masuk ke dalam akun media sosial korban, mengeluarkan alamat surel korban dan mengganti dengan surel pelaku. Tujuannya menguasai akun tersebut dan mengunggah konten intim milik korban tanpa izin.

Jenis KBGO yang dialami korban tidak hanya pada satu jenis. Pada September 2023, ada korban yang mengalami dua jenis KBGO dalam kurun waktu seminggu. Akun media sosial korban diambilalih oleh pelaku lalu dijadikan alat untuk balas dendam dengan menyebarkan konten intim korban yang ia dapat sejak mereka berpacaran. Dalam pengalaman KBGO ini, korban mengalami *hacking* dan penyebaran konten intim tanpa izin (NCII) dalam satu waktu.

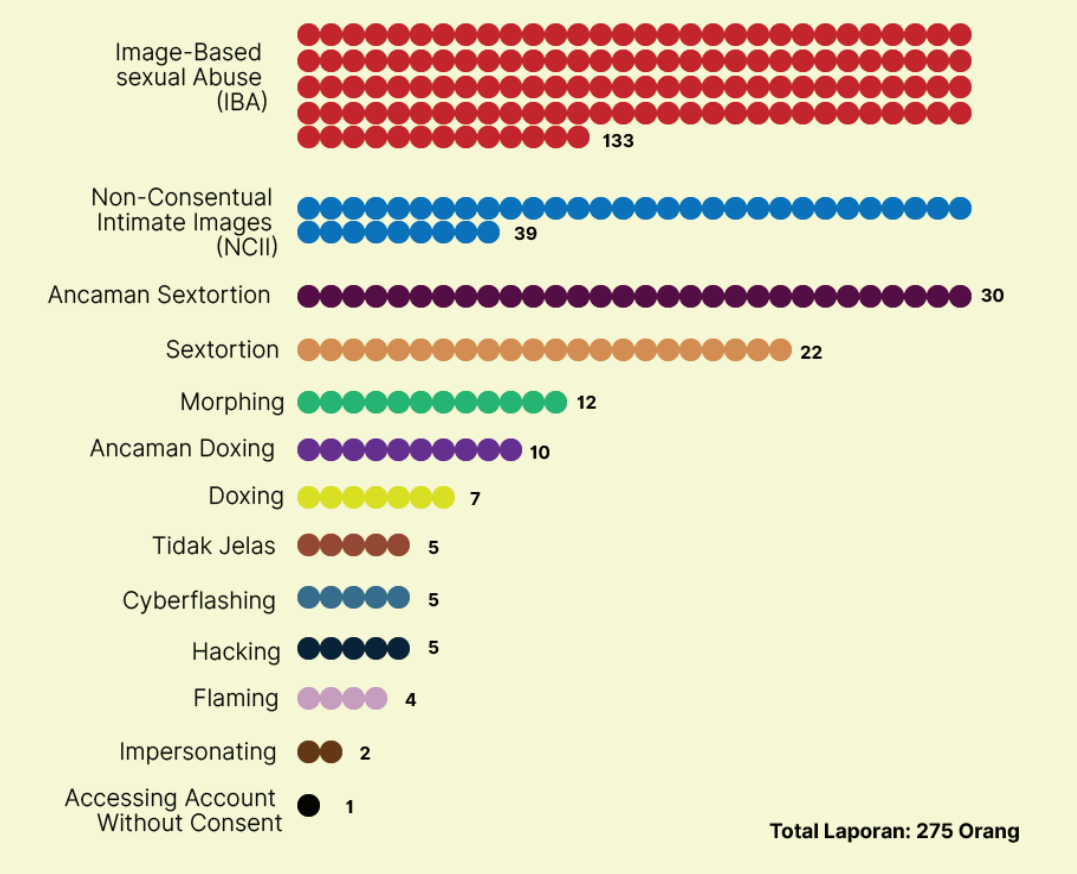

Gambar 12. Jenis KBGO yang dialami korban pada triwulan III tahun 2023. Sumber: SAFEnet, 2023

Jenis KBGO yang berlapis juga terjadi ketika pelaku melakukan modus rekrutmen daring. Pelaku mengajak korban untuk terlibat dalam kegiatan seksual dengan iming-iming sejumlah uang. Syarat penting untuk mendapatkan uang tersebut dengan saling berbagi konten intim di aplikasi Telegram. Korban pun dijadikan budak seks tanpa sadar dan dipaksa untuk mengungkapkan data dirinya. Secara rutin hingga beberapa hari kemudian, korban mengulangi perbuatan tersebut. Hingga pelaku mendapatkan banyak konten korban, pelaku mengancam akan menyalahgunakan konten intim pelapor hingga mengumbar data pribadi pelapor. Dua jenis KBGO, yaitu *image-based sexual abuse* dan ancaman d*oxing*, terjadi dalam satu korban.

Sindikat dan Balas Dendam

Dalam memantau aduan KBGO, SAFEnet menarik data dengan persetujuan yang dapat dipilih, apakah keterangan korban bersedia untuk dipublikasikan. Dari keterangan dalam pemantauan tersebut, beberapa korban mengalami ancaman yang terus-menerus dari pelaku, dan bersedia menceritakan kepada SAFEnet sebagai bentuk perlawanan korban agar tidak menambah korban lainnya.

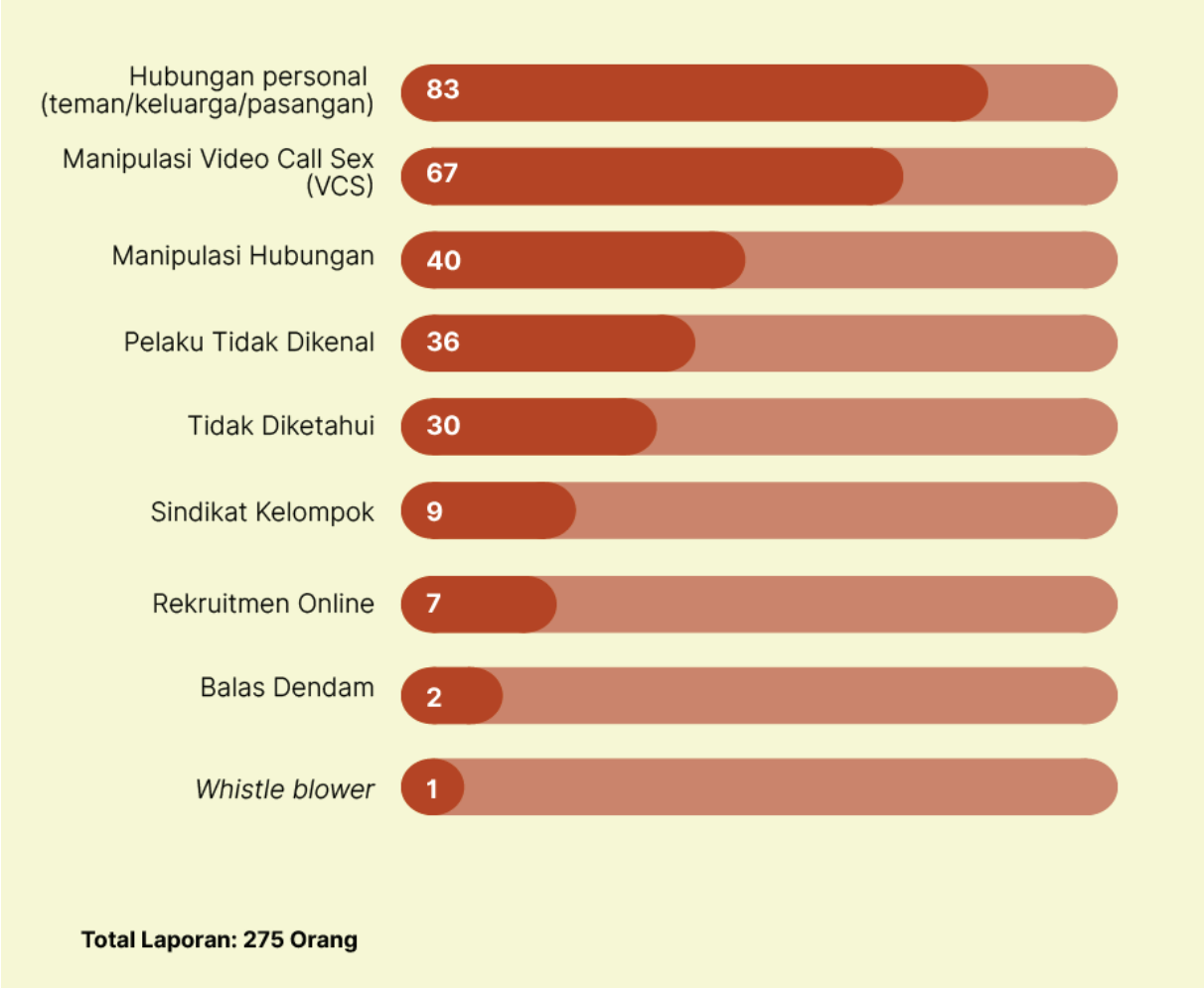

Gambar 13. Modus pelaku KBGO menurut laporan pada triwulan III tahun 2023. Sumber: SAFEnet, 2023.

Dalam berbagai keterangan korban, muncul modus baru yang dilakukan pelaku KBGO untuk melancarkan aksinya. Salah satunya adalah balas dendam kepada korban. Dari pengalaman korban, pelaku mulai menghubungi kembali korban dan pasangan korban yang merasa sakit hati ditinggal korban. Pelaku ingin menyebarkan data pribadi korban dan pasangan korban dengan merendahkan dan menyerang reputasi bahwa korban dan pasangan korban telah melakukan hal senonoh dan pernyataan lainnya yang belum tentu benar. Pelaku terus meneror korban dan pasangan korban dengan alasan pelaku memiliki konten intim lalu akan menyebarkan kepada teman dan orang tuanya.

Modus pelaku lain dilakukan lebih rumit, ditemukan dalam sindikat kelompok. Pelaku yang tidak dikenali melakukan *grooming* kepada korban sehingga korban

tertipu daya untuk mendistribusikan konten intim. Korban juga mengaku diancam oleh pelaku karena pelaku mengakui sudah memiliki konten intim dari pangkalan data aplikasi Tiktok dan akan mulai menjualbelikan. Pelaku tidak tunggal. Banyak pelaku menghubungi korban dengan beberapa akun Telegram sehingga korban merasa ketakutan. Pelaku menyebarkan konten pelapor untuk diperjualbelikan di Twitter dan Telegram.

Tidak hanya dalam bentuk balas dendam dan sindikat, modus pelaku KBGO banyak terjadi untuk merugikan korban dalam psikis dan materiil. Pada Juli 2023, aduan KBGO dialami oleh korban yang mengalami manipulasi v*ideo call sex* (VCS). Korban KBGO merasa terancam oleh pelaku yang mengancam untuk menyebarkan hingga melakukan *sextortion* dengan sejumlah uang. Bahkan, sebelum diancam, korban sudah mentransfer kepada pelaku karena VCS yang ditawarkan pelaku tidak berbayar. Tidak hanya modus memuaskan hawa nafsu, ajakan pelaku untuk menjalani hubungan *friend with benefit* (FWB) juga terjadi dalam modus manipulasi VCS ini. Pelaku juga menggunakan perangkat lain untuk menampilkan video intim bukan milik pelaku, lalu diarahkan kepada perangkat yang yang terhubung dengan korban.

Tidak hanya *online grooming,* KBGO anak menyasar kepada penyebaran konten tanpa izin yang dilakukan pelaku tidak dikenal. Hal ini dilakukan pada salah satu pengguna Tiktok.[26] Akun Tiktok ini sering menduplikasi konten seseorang di dunia maya tanpa izin. Akun yang lebih banyak membahas tentang *review gamers*[27] ini menduplikasi sebuah foto empat orang anak disertai dengan keterangan yang merujuk ke arah seksual. Setelah viral, seorang kakak dari salah satu anak di dalam foto menuntut akun tersebut untuk dihapus.

Penggunaan konten dewasa yang berpura-pura sebagai seorang anak, khususnya anak SD juga banyak ditemukan di media sosial. Pencarian “Anak SD Masih Mulus”, “Emang Kuat Sama Anak SD”, “Masih SD badannya udah gede” marak ditemukan dalam aplikasi Tiktok. Butuh pertanggung jawaban platform untuk dapat menghentikan konten anak, termasuk orang dewasa yang memerankan anak bermuatan pornografi.

Referensi

1 *Untuk menyebutkan keseluruhan provinsi-provinsi di Papua bagian Barat.*

2 *https://kaltara.tribunnews.com/2023/08/18/info-gempa-pagi-ini-kamis-18-agustus-2023-gempa-bumi-guncang-papua-barat-cek-lokasi-dan-dampaknya*

3 *https://nasional.tempo.co/read/1761481/ksad-jenderal-dudung-abdurachman-kunjungi-papua-tutup-pekan-seni-budaya-dan-olahraga*

4 *https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/611521/tni-kkb-papua-berulah-untuk-cari-sensasi*

5 *https://www.antaranews.com/berita/3618534/4500-personel-disiagakan-amankan-kunjungan-presiden-jokowi-di-papua*

6 *https://ceposonline.com/papua-selatan/merauke/22/09/2023/gangguan-internet-di-merauke-murni-force-majeur/*

7 *https://papua.tribunnews.com/2023/09/17/jaringan-telekomunikasi-di-merauke-kembali-bermasalah-ini-penyebabnya*

8 *https://www.rmolpapua.id/jaringan-internet-di-merauke-down-akibat-gangguan-pada-sk-kl-smpcs-di-ruas-merauke-timika-7827*

9 *https://cenderawasihpos.jawapos.com/lintas-papua/merauke/27/09/2023/jaringan-internet-putus-parpol-kesulitan-lakukan-pencermatan/*

10 *https://regional.kompas.com/read/2023/09/21/185800178/jaringan-internet-di-merauke-putus-ujian-online-cpns-hingga-transaksi?page=all*

11 *https://ceposonline.com/papua-selatan/merauke/23/09/2023/jaringan-internet-putus-ribuan-warga-dan-mahasiswa-demo/*

12 *https://suryapapua.com/tiga-kali-jaringan-internet-merauke-putus-dalam-setahun-romanus-mbaraka-saya-sempat-marah-ke-gm-pt-telkom-papua/*

13 *https://selular.id/2023/10/kominfo-dorong-hanya-3-operator-seluler-di-indonesia-simak-tanggapan-atsi/*

14 *https://inet.detik.com/law-and-policy/d-6902633/starlink-masuk-indonesia-jadi-sinyal-ancaman-bagi-operator-seluler*

15 *https://tekno.kompas.com/read/2023/09/22/09202577/kominfo-sudah-pulihkan-google-docs-bukan-diblokir-tapi-kesalahan-teknis*

16 *https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230922114319-37-474720/heboh-google-docs-diblokir-ini-penjelasan-kominfo*

17 *https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231004133149-37-477812/salah-blokir-situs-hackerrank-kominfo-buka-suara*

18 *https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231004133149-37-477812/salah-blokir-situs-hackerrank-kominfo-buka-suara*

19 *https://www.kominfo.go.id/content/detail/51172/siaran-pers-no-258hmkominfo082023-tentang-ciptakan-pemilu-2024-damai-kominfo-putus-akses-122-konten-indoktrinasi-radikalisme/0/siaran_pers*

20 *https://dataindonesia.id/varia/detail/kominfo-blokir-161823-konten-judi-online-pada-januari-juli-2023*

21 *https://www.kominfo.go.id/content/detail/52008/siaran-pers-no-352hmkominfo102023-tentang-situs-terimbas-pemutusan-akses-kominfo-terus-sempurnakan-sistem-penanganan-konten-negatif/0/siaran_pers*

22 *https://papuabarat.tribunnews.com/2023/07/25/bupati-dan-wabup-raja-ampat-laporkan-akun-facebook-ini-ke-polisi*

23 *https://mediaindonesia.com/megapolitan/608013/polda-metro-tetapkan-tiktokers-tersangka-kasus-pencemaran-nama-baik*

24 *https://tekno.kompas.com/read/2023/08/10/12150037/ponsel-kapolda-jateng-diretas-via-file-apk-penipuan-ini-ciri-ciri-modusnya*

25 *Thorn. 2022. Online Grooming: Examining Risky Encounters Amid Everyday Digital Socialization. Amerika Serikat: Thorn.*

26 *Penyebaran konten anak tanpa izin disebarkan melalui media tiktok dengan username @user43615***16. Untuk saat ini, akun diambilalih dnegan berganti konten hingga seluruh profilnya.*

27 *Review gamers membahas tentang pemain game dengan keunikannya. Banyak akun bebas yang membahas mengenai kehidupan pemain game, seperti ability-nya dalam bermain game, hingga membahas kecantikan dan kegantengan seorang gamers.*

Laporan ini disusun sebagai bagian dari program Meningkatkan Perlindungan Hak-hak Digital di Indonesia yang dilaksanakan SAFEnet dengan dukungan dari Luminate. Semua isi laporan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab SAFEnet.